ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR OLEH PEMERINTAH DAERAH

Oleh : Fadhli Arifman
NIM : 1420531008

Pembimbing :

Dr.Suhairi, SE, M.Si dan Dra. Nini syofriyeni, M.Si

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian kinerja standar pelayanan minimal pendidikan dasar oleh Pemerintah Daerah berdasarkan indikator pencapaian Permendikbud nomor 23 tahun 2013 di dua Kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat yaitu Pemerintah Kota Padang Panjang dan Kota Solok. SPM juga menjadi tolak ukur kinerja pemerintah dalam bidang pendidikan agar pemerintah bisa menentukan alokasi anggaran berdasarkan standar yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian *mix method*. Analisis penelitian ini dilakukan dengan metode *forced distribution*.

Penelitian ini membahas dua hal tentang pencapaian kinerja SPM pendidikan dasar berdasarkan Permendikbud diatas, *pertama* pencapaian kinerja SPM pendidikan dasar oleh Pemda dengan 14 indikator pencapaian terbagi dalam 3 standar nasional pendidikan (standar sapras, pendidik dan proses), dimana hasil penelitian pencapaian SPM yang dilaksanakan oleh Pemko Padang Panjang menunjukkan rerata dari 3 standar tersebut sebesar 90,9% mempunyai interpretasi baik dengan kesenjangan 8,1%. *Kedua* hasil rerata pencapaian kinerja SPM yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan (SDN dan SMPN) di Kota Padang Panjang dengan 13 indikator pencapaian terbagi dalam 5 standar nasional pendidikan (standar sapras, proses, isi, penilaian, dan pengelolaan) sebesar 92,3% dengan interpretasi baik. Sedangkan pencapaian SPM pendidikan dasar yang dilaksanakan oleh Pemko Solok sebesar 96,3% mempunyai interpretasi baik dengan kesenjangan 4,7%, dan nilai rerata pencapaian SPM oleh satuan pendidikan dasar (SDN dan SMPN) di Kota Solok 94,3% dengan interpretasi baik, dan kesenjangan sebesar 5,7%. Kesenjangan kinerja ini mengharuskan pemerintah daerah tetap memprioritaskan penataan pembiayaan pendidikan di Kota Padang Panjang dan Kota Solok dengan cara meningkatkan dan mengefisienkan penggunaan anggaran yang ada.

Kata kunci: kinerja, standar pelayanan minimal, pendidikan dasar.

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA